IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat Usul Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Ekonomi

Oleh :

FITRIA HANDAYANI
NIM. 1516130063

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020 M/ 1441 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitria Handayani

NIM : 1516130063

Prodi : Ekonomi Syari'ah

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui http://smallseotools.com/plagiarismchecker/ skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 17 Februari 2020 M
22 Jumadil Akhir 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Yang Membuat Pernyataan

Fitria Handayani
NIM. 1516130063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang Ditulis Oleh Fitria Handayani, NIM : 1514130063 Dengan Judul "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)" Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Telah Diperiksa dan Diperbaiki Sesuai Dengan Saran Pembimbing I dan II. Oleh Karena Itu, Skripsi ini Disetujui dan Layak Untuk Dijukan Dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 14 Febuari 2020 M
20 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Fatimah Yunus, MA	**Desi Isnaini, MA**
NIP. 196303192000032003	**NIP. 197412022006042001**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telpon. (0736) 51276-51171-53879 Fax. (0736) 51771-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)", Oleh Fitria Handayani, Nim: 1516130063, Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipetahankan di depan Tim Sidang *Munaqosyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Februari 2020 M / 1 Rajab 1441 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syari'ah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 27 Februari 2020 M
3 Rajab 1441 H

Tim Sidang Munaasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dra. Fatimah Yunus, MA	**Amimah Oktariana, ME**
NIP. 196303192000032003	**NIP. 199210212018012001**
Penguji I	**Penguji II**
Andang Sunarto, Ph.D	**Nonie Afrianty, ME**
NIP. 197611242006041002	**NIP. 199304242018012002**

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul ***"Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)".*** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari orang lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuhan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2020 M
3 Jumadil Akhir 1441 H

Penulis

METERAI TEMPEL
DCE73AHF131122316
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fitria Handayani
NIM: 1516130063

MOTTO

"Dua kunci keberhasilan dalam hidup yaitu belajar pada orang yang telah sukses dan belajar pada orang yang pernah gagal dalam hidup dan bisnisnya..."

(Jhon Savique Capone)

هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَٰنِ إِلَّا الْإِحْسَٰنُ ﴿٦٠﴾

tidak ada Balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.

(QS. Ar-Rahman : 60)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dari hati saya yang terdalam kepada ALLAH SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA)". Sholawat beriring salam tak lupa saya lantunkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW. Karya ini kupersembahkan untuk mereka yang kusayangi yang telah membuat hidupku lebih berwarna :

1. *Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Bapak Supardi dan Ibu Suprehyatin rasa terima kasih saya sampaikan untuk kedua orangtua saya. Seribu tetes keringat yang keluar dari kedua orang tua saya seribu semangat untuk saya menyelesaikan pendidikan ini.*
2. *Yang aku sayangi dan cintai Hidayatullah dan M. Azril Hidaytullah*
3. *Ayuk Serta Kakak-Kakakku Ice Purnama Yanti, S.PDI, Noprian Hidayat, SE dan A.d Putra Nafthomas, SH*
4. *Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat.*
5. *Keluarga besar KKN Sekre 25 tahun 2018*
6. *Sahabat Terbaik Pitrya Indriani Lubis, SE, Nurryani Syafitri, SE, Shinta Ayuningtiyas, SE, Leni Purnama Sari SE, Roza Nurwahidah dan Romi Maryadi serta Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Khususnya Prodi Ekonomi Islam angkatan 2015, yang juga telah memberikan semangat dan masukan kepada saya untuk terus melangkah maju demi meraih kesuksesan.*
7. *Almamater tercinta IAIN Bengkulu, aku bangga memilikimu.*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

ABSTRAK

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

Oleh Fitria Handayani, NIM 1516130063

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dan untuk mengetahui Perspektif ekonomi Islam terhadap implementasi program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Koordinator PKH, pendamping desa dan peserta penerima PKH. Dari hasil peneliti bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) belum terlaksana dengan baik. Sedangkan Perspektif Ekonomi Islam terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena peserta PKH ada yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai peserta PKH. Sedangkan Islam berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan walaupun uang bantuan rutin yang diterima dari program PKH hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehingga bantuan tersebut tidak bisa dijadikan untuk membuka usaha yang dapat mengentaskan kemiskinan.

Kata Kunci: *Program Keluarga Harapan, Perspektif Ekonomi Isla*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. "**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA)".**

Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasana kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah berjuang dalam menyampaikan ajaran Allah sehingga umat islam mendapatkan petunjuk jalan yang di ridhoi Allah baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi ekonomi syari'ah jurusan ekonomi islam. Dalam Penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami menghaturkan terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Desi Isnaini, MA, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

4. Dra. Fatimah Yunus, MA Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan ilmunya dalam membimbing dan memberi motivasi dengan semaksimal mungkin
5. Desi Isnaini, MA, Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan ilmunya dalam membimbing dan memberi motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
6. Keduan orang tuaku yang selalu berjuang dan berdo'a dalam menunggu kesuksesan studiku
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dalam Penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini ke depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Januari 2020 M
3 Jumadil Akhir 1441 H
Penulis

Fitria Handayani
NIM: 1516130063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GRAFIK ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 8
C. Tujuan Penelitian..... 9
D. Batasan Masalah 9
E. Kegunaan Penelitian..... 9
F. Penelitian Terdahulu..... 10
G. Metode Penelitian 13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian 15
3. Informan Penelitian..... 15
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 17
5. Teknik Analisis Data 18
BAB II KAJIAN TEORI
A. Implementasi 23
B. Program Kelurga Harapan 26
1. Pengertian Program Kelurga Harapan 26
2. Tujuan Program Kelurga Harapan 27

3. Hak dan Kewajiban Peserta Program Kelurga Harapan 28
4. Besar Bantuan Program Kelurga Harapan 31
C. Kemiskinan 32
1. Pengertian Kemiskinan 32
2. Jenis-jenis Kemiskinan 33
3. Faktor-faktor Kemiskinan 35
4. Ukuran Kemiskinan 35
5. Program-program Pengentasan Kemiskinan 36
6. Kriteria Kemiskinan 39
D. Ekonomi Islam 40
1. Pengertian Ekonomi Islam 40
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam 41
3. Mengentaskan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonom Isalm . 42
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN
A. Deskripsi Wilayah Penelitian 46
1. Sejarah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma 46
2. Kependudukan 48
3. Sosial 49
4. Pertanian 50
BAB 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian 69
B. Pembahasan 77
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tingkat jumlah kependudukan Kecamatan Sukaraja 48

Tabel 3.2 Tingkat pendidikan kecamatan Sukaraja 49

Tabel 3.3 Kesehatan penduduk Kecamatan Sukaraja 49

Tabel 3.4 Tempat Beribadah Agama Kecamatan Sukaraja 50

Tabel 3.5 Tingkat Tanaman Pangan Kecamatan Sukaraja 50

Tabel 3.6 Tingkat Perkebunan Kecamatan Sukaraja 51

Tabel 3.7 Data Penduduk Desa Bukit Peninjauan I 53

Tabel 3.8 Agama 54

Tabel 3.9 Jumlah Rumah Ibadah..... 54

Tabel 3.10 Tingkat Pendidikan 55

Tabel 3.11 Sarana Pendidikan..... 56

Tabel 3.12 Mata Pencarian..... 56

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Desa Sari Mulyo 59

Tabel 3.14 Pekerjaan 60

Tabel 3.15 Pendidikan..... 60

Tabel 3.16 Sarana dan Prasarana 61

Tabel 3.17 Sarana Ibadah 62

Tabel 3. 18 Tingkat Kesejahteraan Sosial Desa Sumber Arum 65

Tabel 3.19 Tingkat Pendidikan 66

Tabel 3.20 Agama 67

DAFTAR GRAFIK

Gambar 3.1 Tingkat Kesejahteraan Sosial 66

Gambar 3.2 Tingkat Pendidikan 67

Gambar 3.3 Agama 68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sari Mulyo 63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Belangko Pengajuan Judul

Lampiran 2 :Bukti Menghadiri Seminar

Lampiran 3 :Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa

Lampiran 4 :Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran 5 :Halaman Pengesahan Proposal

Lampiran 6 :Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 7 :Pedoman Wawancara

Lampiran 8 :Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 9 :Surat Izin Penelitian

Lampiran 10 :Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Desa

Lampiran 11 :Daftar nama informan

Lampiran 12 :Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 13 :Lembar Dokumentasi Hasil Wawancara

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. pendapatan konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan juga dapt dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk.[1]

Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, tidak ada jaminan sosial, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak tersedianya lapangan kerja.[2]

---

[1]Jonatan Haughton dan Shahidur R. Khandker, *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Jakarta: Selemba Empat, 2012), h. 1

[2]Bambang Rustanto, *Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia*, (Bandung: STKSPRESS, Bandung, 2014). H. 9

Menurut salah satu sosiolog terkenal, yaitu Gans yang menyatakan bahwa kemiskinan memiliki fungsi sosial. Pernyataan tersebut seolah memberikan justifikasi dan pembenaran bahwa kemiskinan itu adalah sah, boleh dan wajar terjadi dalam kehidupan. Alasan klasik yang mendasarinya adalah karena kemiskinan memberi kontribusi sosial dalam menentukan strata kehidupan seseorang. Seseorang dapat disebut kaya bila ada yang miskin sebagai pembanding.

Pada hakikatnya, masalah kemiskinan muncul ketika peradapan manusia sampai pada tahap kesadaran untuk membandingkan antara tingkat kehidupan orang yang satu dengan orang lain baik dalam status sosial maupun status ekonominya. Sejak adanya sikap perbandingan ini, kemudian membuat manusia sadar akan perbedaan kaya dan miskin. Oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa warga yang tidak mengetahui prinsip perbandingan strata, maka tidak akan dijumpai kesadaran tentang permasalahan kemiskinan. Walau sebenarnya menurut pengamatan orang lain, mereka tengah mengalami permasalahan kemiskinan.[3] Islam sebagai agama yang telah mengatur kehidupan manusia tidak hanya pada aspek ibadah, tapi juga pada aspek muamalah.

Islam menganggap kekayaan sebagai suatu anugrah atau nikmat dari Allah yang perlu disyukuri. Sebaliknya, Islam menganggap kemiskinan sebagai problem kehidupan bahkan sebagai suatu musibah yang perlu dihindari.[4]

---

[3]Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). H. 7

[4]Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), cetakan 1, hal 16.

Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut didalamnya ada hak milik orang lain. Kemiskinan sebagai permasalahan sosial tidak akan pernah luput dari perhatian dan pembahasan ajaran Islam. Agama Islam mengupas beberapa tema utama yang sangat urgen mengenai upaya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan mereka. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama Islam mengatakan moral agar keadilan sosial dalam ekonomi ditegakkan terhadap masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan juga dibutuhkan kerjasama peran antara pemerintah, dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan ego sektoral, tetapi harus komprehenshif dari berbagai unsur yaitu pemerintah, peran lembaga terkait dan masyarakat sendiri sebagai subjek dan objek perubahan. Al-Qur’an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus dientaskan. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab atas kemiskinan adalah orang miskin sendiri, bukan masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan.

Al-Qur’an yang membahas kemiskinan mendorong kaum Muslimin agar menjadi umat yang peduli dan berbagi dengan kaum dhuafa, termasuk kaum miskin, dengan memberi pertolongan pertama kepada mereka dalam bentuk perintah memberikan makanan pokok kepada orang miskin guna

menjaga kelangsungan hidup mereka. Upaya mengentaskan kemiskinan ini juga merupakan anjuran agama Islam agar yang bersangkutan menjadi orang yang taqwa. Hal ini seperti yang termuat pada QS Al- Baqarah ayat 177 :

Artinya: *bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak*

> *yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.*[5]

Berdasarkan ayat tersebut, agama Islam menegaskan bahwa salah satu ciri orang taqwa adalah kesediaannya membantu orang miskin agar dapat hidup lebih layak. Allah akan menjamin rezeki bagi seseorang atau bangsa yang berusaha untuk membangun dirinya dengan baik dan terencana. Karena itu seseorang atau bangsa tidak boleh pesimis akan ekonominya kelak, sesulit apapun kondisinya karena Allah telah menjamin segalanya selama seseorang atau bangsa tersebut bersungguh-sungguh. Sebagai mana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khatab ra, bahwa jika kelompok lemah (masyarakat miskin) terbela dan terberdayakan dengan baik, maka kelompok *elite* masyarakat (masyarakat kaya) akan menikmati kemajuan ekonomi yang ada.[6]

Oleh karena itu, diperlukan upaya dan langka strategis yang tepat dan efektif untuk menghadapi tentang perekonomian global yang semakin besar di masa mendatang. Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan semua pihak. Islam mengajarkan agar sektor pemerintah dan swasta atau masyarakat bisa berbagi peran secara adil, sehingga perekonomian bisa berkembang.

Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melalui rogram berbasis perlindungan sosial yaitu Program yang telah

---

[5]Al-quran dan Terjemahan *At-tartil*, (Sukabumi: Yayasan At-tartil, 2014), h. 122

[6]Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*,,,. H. 14-15

dikeluarkan pemerintah terkait tentang penanggulangan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasi Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) dan Program Keluarga Harapan. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan terhadap warga miskin di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.[7] Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program yang dibuat oleh Kementrian Sosial RI yang berdasarkan pada perpres No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sasaran penerima PKH adalah Keluarga Miskin (KM) yang memenuhi minimal satu dari kriteria yang terdiri dari anak

[7]*Kementrian Sosial RI, Mari Kita Mengenal Program PKH*, http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=New&file=print&sit=404, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 pukul 14.40 WIB

usia 0-6 tahun, ibu hamil/nifas, lansia diatas 70 tahun dan Disabilitas berat. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan).

PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.[8]

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tentunya tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan. Salah satunya Desa Bukit Peninjauan 1, Sari Mulyo dan Sumber Arum Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma sendiri sudah berjalan dari tahun 2013. Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Bukit Peninjauan 1, Sari Mulyo dan Sumber Arum Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial pada kelompok masyarakat miskin.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 10 Oktober 2018 di desa Bukit peninjauan 1, wawancara kepada Ibu Suparmi selaku penerima bantuan PKH Kecamatan Sukaraja, peneliti melihat bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

---

[8]*Kementrian Sosial RI, Mari Kita Mengenal Program PKH*, http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=New&file=print&sit=404, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 pukul 14.40 WIB

terdapat permaslahan dalam pelaksanaan. Dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, dimana peserta program PKH tidak memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan enam tahun dan bagi peserta lansia yang mendapatkan PKH tidak mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial seperti senam dn kerja bakti bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun setiap bulannya.

Melihat hal tersebut, maka Program Keluarga Harapan bukanlah suatu proses pengentasan kemiskinan yang mudah dilakukan, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kemampuan yang baik, baik dari pemerintah maupun dari komponen masyarakat terutama masyarakat miskin. Sebab belajar dari pengalaman berbagai program penanggulangan kemiskinan yang pada kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan karena tidak diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan lebih terarah peneliti memberikan batasan penelitian hanya dilakukan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bukit Peninjauan 1, Sari Mulyo dan Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dari Program Keluarga Harapan ada 3 komponen yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial peneliti hanya meneliti dua (2) komponen yaitu komponen kesehatan

anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahun. *Pertama*, bagi pengurus atau pengelolah Program Keluarga Harapan (PKH). *Kedua*, bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu juga penulis dapat memenuhi tugas studi yang sedang ditempuh.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan di harapkan dapat menjadi tambahan litelatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada 3 peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH), berikut penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

1. Meti Herawati (2018), skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Tinjau Dari Etika Ekonomi Islam” Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan

untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Ditinjau dari Etika Ekonomi Islam. Permasalahan yang diangkat mengenai kelayakan dari peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, sampel masyarakat yang terdaftar sebagai penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 40 orang, sementara itu dalam mendapatkan data dilapangan penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa sistem pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Air Teras menerima PKH. Dari data 60 orang yang dikirimkan ke BPS hanya 70% (40 orang) yang mendapatkan bantuan, sedangkan 30% (15 orang) yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). [9]

Dari penjelasan di atas dapat dilihat perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu: 1). perspektif ekonomi Islam terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan 2). Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Bukit Peninjauan 1, Sari Mulyo dan Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. 3). Informan Penelitian. Populasi

[9]Meti Herawati, *"Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Tinjau Dari Etika Ekonomi Islam Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma"*, (Prodi Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), h. iii

yaitu koordinator, pendamping dan peserta Program Keluarga Harapan Di Desa Bukit Peninjauan 1, Sari Mulyo dan Sumber Arum .

2. Jurnal Indonesia Muhammad Nasir berjudul “Pengaruh dan Efektifitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan efektifitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang menerima bantuan PKH di Kecamatan Murata Tiga Kabupaten Aceh Pidie. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan metode “stratisfield random sampling” sebanyak 23 persen dari jumlah 871 respoden sehingga diperoleh sampel sebanyak 200 responden. Hasil penelitian menunjukan dana bantuan PKH yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan Muara Tiga abupaten pidie adalah telah dilakukan dengan sangat efektif, dimana rata-rata tingkat efektifitas pemberian bantuan PKH dari tahun 2008-2013 mencapai 95,58 persen. Bantuan PKH mampu menjelaskan atau mempengaruhi partisipasi pendidikan anak-anak RTSM di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten pidie mencapai 96,8 persen dan sisanya sebesar 3,2 persen di pengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. Pemberian bantuan PKH hendaknya tepat sasaran dan bener-benar ditunjukan untuk meningkatkan pendidikan anak. Hal ini penting, karena

bantuan tersebut hanya bersifat sementara dan lebih terfokus untuk memutuskan mata ratai kemiskinan. [10]

3. Jurnal Internasional Ach Rasyad yang berjudul "Participative Evaluation and the uality of Community Empowerment Training of Program Keluarga Harapan (PKH) Companions". Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan : (1) pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat sahabat PKH, (2) jenis evaluasi partisipatif yang digunakan dalam pelatihan pendamping PKH, dan (3) hambatan dan faktor pendukung dalam pelatihan pendamping PKH menggunakan evaluasi partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka studi kasus. Itu dilakukan dalam penelitian pendamping PKH di Kabupaten Klojen, malang. Subjek penelitian ini adalah pendamping sebagai fasilitator pelatihan pemberdayaan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dikurangi sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, disajikan dalam deskripsi fakta, kemudian kesimpulan atau verifikasi diambil. Temuan penelitian menunjukkan: (1) metode pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan pendamping PKH adalah pendekatan *andragogi* yang menekankan pada partisipasi aktif dan pengalaman peserta, (2) evaluasi yang digunakan dalam pelatihan pendamping PKH adalah penilaian pedesaan partisipatif (PRA) metode dengan melakukan diskusi kelompok fokus (FGD) dan kuesioner, (3)

[10]Muhammad Nasir, *Pengaruh dan Efektifitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie,* Jurnal Indonesia, Volume 32 No 1 (Febuari 2017), h. 5

kelemahan menggunakan evaluasi partisipatif ini memakan waktu yang relatif lama dan diskusi cenderung berada di luar konteks.[11]

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara menjelaskan atau menggambarkan dalam bentuk kata-kata yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. [12]

penelitian kualitatif menurut sugiyono yaitu: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[13]

Berdasarkan teori di atas, untuk Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma) dengan unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian maka digunakanlah metode penelitian kualitatif.

---

[11]Ach Rasyad, *Participative Evaluation and the uality of Community Empowerment Training of Program Keluarga Harapan (PKH) Companions*, Jurnal Internasional, Volume 9, Issue 3 (Mar-Apr. 2013), h. 6

[12]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi Dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), h. 14

[13] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.1

Selain itu, dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti bisa mendapatkan dan menyajikan data yang akurat serta bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 5 (lima) bulan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, waktu yang digunakan mulai dari bulan Juli 2018 sampai dengan selesai. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Maka peneliti telah melakukan wawancara awal kepada pendamping PKH dan peserta PKH di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

b. Tempat penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Bukit Peninjauan 1, Desa Sari Mulyo dan Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini karena penulis telah melakukan observasi dan menemukan adanya masalah yang perlu diteliti.[14]

3. Subjek/Informan Penelitian

[14]Asnaini, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Febi, 2016), h. 17

Informan adalah subjek informasi atau responden sebagai objek penelitian, adalah pemberian informasi tentang apa yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik dalam pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling.* Hal ini berdasarkan pendapat dari Djunaedi Ghony dan Fauzan Al-Manshur yang menyatakan bahwa *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan yang dilakukan serta dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, oleh karena itu sampel penelitian tidak perlu mewakili populasi, tetapi lebih kepada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada peneliti.[15]

Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sample memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sample yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sample yaitu komponen kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu :

1. Program Keluarga Harapan yang terdaftar di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma selama periode 2015 sampai periode 2018.
2. Komponen kesehatan program keluarga harapan anak usia 0 (Nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

[15]Djunaedi Ghony dan Fauzan Al-Manshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruaz Media, 2012), h. 89

3. Komponen kesejahteraan sosial program keluarga harapan lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.

Berdasarkan dengan pendapat tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini satu petugas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Koordinator PKH, satu petugas pendamping desa dan peserta PKH dari tiga desa dimana 27 peserta dari desa Bukit Peninjauan I diambil 5 peserta PKH, 23 peserta dari desa Sari Mulyo diambil 5 peserta PKH dan 25 dari desa Sumber Arum diambil 5 peserta PKH dan dapat dilihat dari tabel berikut :

No	**Nama**	**Jabatan**
1	Edi hermanto	Koordinator pkh
2	Eva	Pendamping atau ketua pkh
3	Suparmi	Peserta pkh
4	Syarifah	Peserta pkh
5	Juariah	Peserta pkh
6	Yuyum	Peserta pkh
7	Ningsih	Peserta pkh
8	Ratih	Peserta pkh
9	Prayet	Peserta pkh
10	Sinah	Peserta pkh
11	Lusi	Peserta pkh
12	Baidin	Peserta pkh
13	Erna	Peserta pkh

14	Suliem	Peserta pkh
15	Yanti	Peserta pkh
16	Nyaik	Peserta pkh
17	Supreh	Peserta pkh

Sumber : *Koordinator PKH Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun data-data yang akan peneliti kumpulkan yaitu terbagi atas 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Sumber Data Primer yaitu sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Data primer ini diperoleh secara langsung dari Koordinator PKH, pendamping desa dan peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukaraja baik dari hasil observasi maupun wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

   Yaitu sumber penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Sumber sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Data

sekunder dalam penelitian ini adalah foto-foto, sejarah serta profil Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung atau tidak langsung. Peneliti mencatat informasi yang penulis lihat secara langsung di lapangan .[16] Maka dari itu, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan apabila objek penelitian bersifat perilaku, fenomena alam, proses kerja. Bentuk observasi yang dilakukan mengamati secara langsung lokasi penelitian dan mengambil proses kesimpulan dari hasil pengamat tersebut. teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang diteliti di lapangan yaitu terkait dengan Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma di Desa Bukit Peninjauan I, Sumber Arum dan Sari Mulyo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dengan terwawancara dengan maksud untuk

[16]Lexy Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm.186

memperoleh informasi.[17] Guba dan Licolin mengatakan bahwa teknik ini memang merupakan teknik pengumpulan data yang khas bagi penelitian kualitatif. Agar mempermudah peneliti untuk mendapat informasi dari respon dan dengan jalan tanya jawab sepihak agar memperoleh data berkenaan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah seorang pewawancara atau peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, yang berdasarkan masalah yang akan diteliti.[18] Dimana Penulis akan membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya mengenai judul penelitian. Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan agar proses wawancara dapat berlangsung dengan baik. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Koordinator PKH dari Kecamatan Sukaraja, Pendamping PKH dan Peserta PKH di tempat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dan informan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, maka peneliti

[17]Djam'an Satori dan Aan Komariah, *metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabrta, 2017) hlm. 129

[18]Iskandar, *Metodelogi Penelitian pendidikan dan Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), H. 217

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan terkait tentang Program Keluarga Harapan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data tentang apa yang akan diteliti yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen untuk menambah pemahaman atau informasi penelitian. Sebagai pendukung alat pengambilan data, dokumentasi digunakan mengambil data yang berkaitan dengan bukti-bukti fisik yang kaitannya dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi merupakan penelitian terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.[19] Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membantu kelengkapan dan kebenaran data, diantaranya foto-foto observasi yang peneliti lakukan, foto pada saat peneliti melakukan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Interaktif.

[19]Iskandar, *Metodelogi Penelitian pendidikan dan Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), H. 217

Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut:[20]

a. Reduksi data

Karena data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan benar. Yaitu dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-dokumen organisasi yang masih berkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar. Dengan ruduksi data, maka data yang tidak perlu akan dibuang.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan sekumpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan pemahaman terhadap apa yang telah diamati.

c. Penarikan serta pengujian kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil ditangani secara terbuka, sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tepat. Kesimpulan ini juga diverfikasikan selama penelitian berlangsung dengan maksud

[20] Huberman, *Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Pelangi Perkasa, 2007), h. 104-106

menguji kebenaran, ketepatan, dan mencocokannya pada validitasnya. Sehingga penelitian yang sudah dilakukan, dapat diketahui kebenarannya dengan menggunakan penarikan dan pengujian kesimpulan.[21]

[21] Nasir Moh, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 53

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.[22] Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi juga berarti perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.[23]

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Menurut Grindle, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai suatu sasaran.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan nyata setelah dirumuskannya suatu

---

[22]*Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online dalam http://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada hari Kamis tanggal 19-05- 2019 pada pukul 11.20 WIB

[23]Tri Setiani, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, tahun 2014, hal 10

program. Tindakan nyata ini bukan hanya sekedar aktivitas, namun lebih kepada kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. Dalam implementasi sebuah program khususnya yang melibatkan banyak Organisasi atau Instansi pemerintah, maka proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu :

a. Pembuat Kebijakan

Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga atau pejabat tingkat yang lebih rendah atau daerah, dalam upaya mereka memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat atau kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Apabila ternyata program tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemungkinan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap program tersebut/pengenaan sanksi hukum tertentu pada pejabat yang bertanggungjawab, jika perlu kebijakan itu sendiri dirumuskan kembali. Kendatipun demikian, perhatian utama dari pusat ini biasanya berkenaan dengan masalah, pertama, sejauh mana tujuan atau sasaran resmi kebijakan telah tercapai, kedua apa alasan yang menyebabkan tujuan tertentu tercapai atau tidak.[24]

b. Pejabat-Pejabat Pelaksana Lapangan (*the periphery*)

[24]Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-ModelImplementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), cetakan I, hal 135-137.

Dari sudut pandang ini, implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejaba dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya, yang berasal dari usaha-usaha pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru yang dipercayakan kepada mereka.

c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni Kelompok Sasaran (target group)

Kelompok sasaran akan lebih memusatkan perhatiannnya pada permasalahan apakah pelayanan atau jasa yang telah diberikan pemerintah tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya, benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup, termasuk pendapatan mereka. Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran ini amat penting artinya bagi para pejabat pusat. Sebab, pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik politik (*political feedback*) dan peka terhadap asumsi-asumsi keperilakuan (*behavioral assumptions*) yang mendasari penyusunan setiap program.

Akhirnya, pada tingkatan abstraksi tertinggi, hasil implementasi menyiratkan bahwa telah terjadi semacam perubahan terukur mengenai masalah luas yang merupakan tujuan program, hukum publik dan keputusan hukum.[25]

B. Program Keluarga Harapan

[25]Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), cetakan I, h. 138-139

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Kelurga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Tujuan dari PKH ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup kelurga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) pengaturannya dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Kelurga Harapan (Permensos 1/2018). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada kelurga seseorang miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai kelurga penerimaan Program Kelurga Harapan (PKH).[26]

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial. Sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteran sosial sebagai berikut :

---

[26]*Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018* Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), h. 4

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi :

1. Ibu hamil atau menyusui; dan
2. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Kriteria komponen pendidikan meliputi :

1. Anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
2. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
3. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :

1. Lanjut usia mulai dari 60 tahun; dan
2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.[27]

2. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM (Rumah Tangga Miskin) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.

[27]Sri Masuta Laluhang, *Implementasi Program Kelurga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Ke. Kendahe, Kabupaten Sangihe*, dikutip dari http://www.file:///C:/Users/mulia/Dowloads/7597-14952-1-SM.pdf. pada hari kamis, tanggal 25 Oktober 2018, pukul 13.24 WIB.

b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM .
d. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM**.**

3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 6 Keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan:

a. Bantuan sosial PKH
b. Pendamping PKH
c. Pelayanaan di fasilitas kesehatan,pendidikan dan kesejahteraan sosial dan
d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.[28]

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 7 Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk:

a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil / menyusui dan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun.
b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.

[28]*Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 6* Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), h. 5

c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 8 :

1) Keluarga penerima manfaat PKH akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
   a) Kesehatan
   b) Pendidikan
   c) Kesejahteraan sosial[29]
2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:
   a) Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas
   b) Memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif dan
   c) Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

[29] *Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 6* Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), h. 7- 8

3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
   a) Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun terhadap anggota keluarga lanju usia mulai dari 60 tahun; dan
   b) Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyadang disabilitas berat.[30]

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 9 :

1) Apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dikenakan sanksi.
2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.[31]

4. Besaran Bantuan Program Kelurga Harapan

[30] *Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 8* Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), h. 8 –9.

[31] *Permensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9* Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH pada setiap kompenen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti sekenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 02
Besar Bantuan Komponen PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 2.600.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp. 2.500.000
3	Bantuan peserta pendidikan setara SD/ Sederajat	Rp. 900.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ Sederajat	Rp. 1.500.000
5	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ Sederajat	Rp. 1.800.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 2.600.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keata	Rp. 2.500.000

Sumber : *Koordinator PKH Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*.

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, Mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang dibuat garis kemiskinan (*povertyline*) atau batas kemiskinan (*povertytresshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan secara 2.100 kilo kalori kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi.[32]

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya pendapatan (*income*) suatu komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Pengalaman di lapanagan menunjukan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permaslahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi

[32]Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), Hal : 2

berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang disebut dengan *kemiskinan plural*.[33]

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah finansial saja, tetapi juga meliuputi semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui garis kemiskinan. Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup baik makanan dan non makanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

a. Kemiskinan absolut

Bilamana tingkat pendapatan yang diperoleh berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar minimum, misal: pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

[33] Ali Khomsan dkk, *Indikator Kemiskinan*…, h.5

b. Kemiskinan relatif

Dicirikan bila pendapatan yang diperoleh seseorang atau rumah tangga berada diatas garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibanding rata-rata tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya.

c. Kemiskinan kultural

Terdapat sikap dan perilaku sesorang atau rumah tangga yang tidak mau bersedia bekerja secara produktif untuk perbaikan mutu kehidupan dikarenakan tekanan faktor budaya.

d. Kemiskinan kronis

Terjadi apabila pengaruh beberapa faktor bekerja secara simultan. Berbagai faktor yang kerap menyebabkan kemiskinan kronis dapat bersifat internal (tunakarya dan pendapatan rendah) dan eksternal (penetrasi pasar kuat).

e. Kemiskinan sementara

Jenis kemiskinan sementara terjadi karena siklus ekonomi terganggu oleh berabagai faktor yang mampu mengalihkan kondisi normal ke kondisi tertentu dengan indikasi kemunculan krisis. Jenis kemiskinan yang lain ialah kemiskinan natural yang berlangsung secara alami turun-temurun antar generasi dalam satu keluarga. Kemiskinan ini diakibatkan oleh kondisi lingkungan alamiah yang menyulitkan warga melakukan perubahan agar keluar dari belenggu kemelaratan.

3. Faktor-Faktor Kemiskinan

Akar kemiskinan dapat dibedakan dua macam, pertama kemiskinan alamiah, kedua kemiskinan buatan.

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang timbul akibat sumber-sumber daya yang langkah jumlahnya atau tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Maksudnya menyebabkan faktor-faktor kemiskinan pada masyarakat secara alami memang ada. Mungkin saja dalam keadaan alamiah tersebut yang lebih miskin dari yang lain.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.[34]

4. Ukuran Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan atas norma-norma tertentu yang terdapat di suatu daerah. Pemilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Batas garis kemiskinan ini dibedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan, sebab antara perkotaan dan pedesaan sudah barang tentu memiliki batasan kemiskinan yang berbeda karena perbedaan harga yang terjadi.

---

[34]Krisna, Murti, dkk, *Analisis Diskriminan*…, h. 98

Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas dua unsur, yaitu: *pertama*, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minuman dan kebutuhan dasar lainnya. *Kedua*, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.[35]

5. Program-Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpes (peraturan presiden) tersebut dinamakan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat yang keanggotaan yang terdiri dari unsur pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan pemangkuan kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten atau kota.

Adapun program-program pemerintah yang telah berlangsung dan telah diterapkan diselurah sektor pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah atau kota mengenai pengentasan kemiskinan yaitu:

a. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1
   1) Program Kelura Harapa (PKH).
   2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

[35]M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta 2010), h. 237-238

3) Program Bnatuan Siswa Miskin (BSM).

4) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

5) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN).

b. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II.

1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

2) PNPM Mandiri Perdesaan.

3) PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitas dan Rekonstruksi Pulau Nias).

4) PNPM Mandiri Agribisnis atau SADI (*Smallholder Agribusiness Development Initiative*).

5) PNPM Generasi Sehat dan Cerdas.

6) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP).

7) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP).

8) PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua.

9) PNPM Mandiri Perkatoran.[36]

10) PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan.

11) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

12) Program penyediaan air minum berbsis masyarakat (PAMSIMAS).

13) PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus atau Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

14) PNPM-Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP).

15) PNPM-Mandiri Pariwisata.

---

[36]Iril Pahmi, *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karimun*, diikutip dari http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/viewFile/159/432, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, pukul 14.21 WIB.

16) PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman.

17) Program periuasan dan pengembangan Kesempatan Kerja atau Padat Karya Produktif.

c. Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III.

1) Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta.

2) Kredit Usaha Bersama (KUBE).

KUBE adalah program yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota KUBE didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sadang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan, meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya, meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

3) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH).

Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni merupakan bantuan pemerintah dalam rehabilitasi rumah yang tidak layak

huni. Tujuan dari bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini adalah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki hunian atau tempat tinggal yang layak.[37]

6. Kriteria Kemiskinan

Berdasarkan studi SMERU, Suharto menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan).
b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
c. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar,wanita korban tidak kekerasan rumah tanga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.
d. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan dan sakit-sakitan).
e. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan asset).
f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambunngan.
g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhaan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

[37]Iril Pahmi, *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karimun*, diikutip dari http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/viewFile/159/432, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, pukul 14.21 WIB.

h. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat).

i. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.[38]

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan al-Iqtishad, al-Islami yang secara bahasa berarti berkeadilan.[39] Ekonomi diefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang prilaku manusia dalam pemanfaatan sumber-sumber produksi.[40]

Menurut Abdullah Abdul Husain Ekonomi Islam adalah:

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.[41]

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah

---

[38]Iril Pahmi, *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karimun*, diikutip dari http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/viewFile/159/432, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, pukul 14.21 WIB.

[39] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakrta: Rajawali Pers, 2016), h. 113

[40] Suhrawadi K. Lubis dan Farid wajdi, *Hukum Ekonomi ISLAM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 14

[41]Abdulah Abdul Husain, E*konomi Islam*, (yogyakarta: Graha Ilmu,2014), h. 14

sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist mencapai kebahagian dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

a. Al-Qur’an

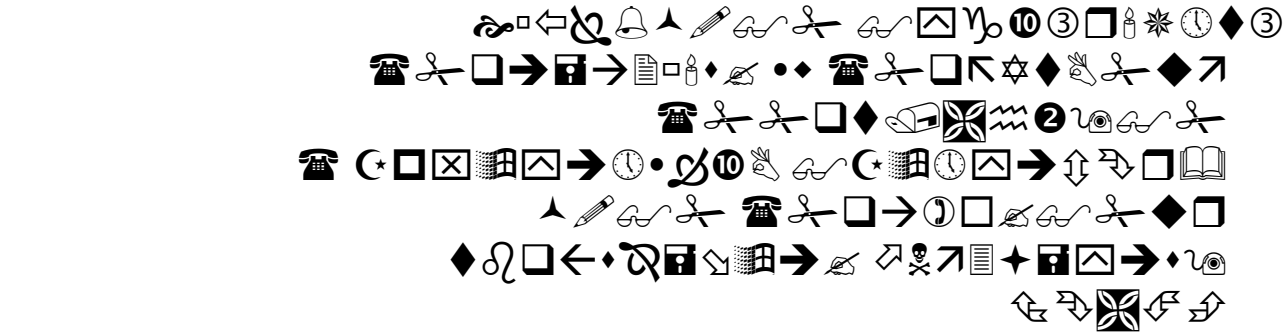

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (Ali Imran ayat 130).[42]

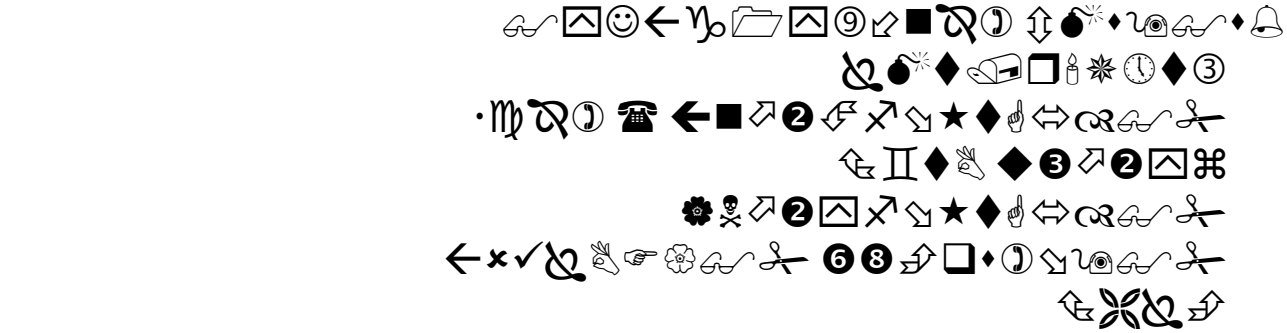

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*(Al-Qashashayat 26).[43]

b. Hadist

[42] Departemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah*…, h. 210
[43]Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah*…, h. 385

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ نَهَى عَنْ اَلْمُزَارَعَةِ

وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

Artinya: *Dari Tsabit Ibnu ad-Dlahak Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang muzara'ah (sama dengan musaqat, yaitu memberikan tanah garapan kepada orang lain dengan bagi hasil menurut perjanjian dan memerintahkan sewa-menyewakan.* (Riwayat Muslim).

3. Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam

Menurut teori Bayu Tri Cahya**,** kemiskinan dalam Al-Quran dan Hadis ada dua yaitu :

a. Fakir

Kata fakir menunjukkan kepada seseorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali. Menurut bahasa, kata faqrun, maknanya adalah hal yang lepas dari segala sesuatu, baik bagian dari anggota tubuhnya ataupun yang lainnya. Dalam al-Quran sendiri terdapat dalam salah satu surat Al-Baqarah ayat 271 :

Artinya *:" jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".*[44]

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir diartikan sebagai orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.

b. Miskin

Kata Miskin asal katanya adalah as-sakan, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata; "Huruf sin, kaf dannun adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, seperti dikatakan, '*Sakana asy-syai'u yaskunu sukunan sakinan*.

Sehingga bisa diartikan orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, atau orang yang memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat geraknya menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk bergerak, atau bisa juga berarti orang yang berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada

[44]Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah*…, h. 215

manusia. Dalam Al-Quran yang menjelaskan kata miskin salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 177 :

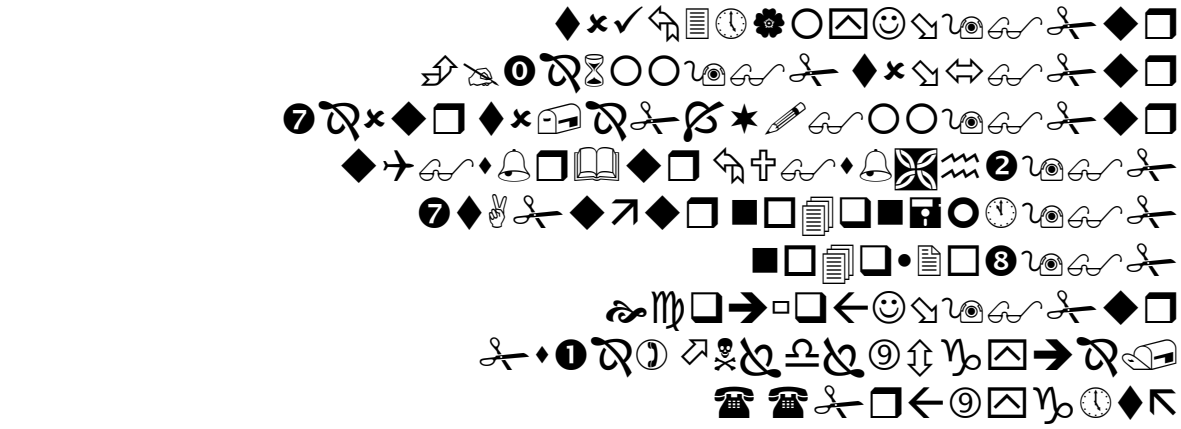

Artinya : *"orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat".*[45]

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).

4. Mengentaskan Kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam

Menurut teori Bayu Tri Cahya, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam Islam dapat dibagi pada tiga hal pokok yaitu:

a. Kewajiban setiap individu

Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci al-Quran, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kesenangan kepada

[45] Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah*…, h. 175

syahwat, berupa wanita (lawan seks), harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi seperti yang dijelaskan dalam surat Ali ‘Imran ayat 14 yang artinya:

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).[46]

Ayat ini secara tegas menggarisbawahi dua naluri manusia, yaitu naluri seksual yang dilukiskan sebagai “kesenangan kepada syahwat wanita” (lawan jenis), dan naluri kepemilikan yang dipahami dari ungkapan (kesenangan kepada) “harta yang banyak”.

Kalau demikian kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. Sedang mengharapkan

[46]Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah*…, h. 224

usaha orang lain untuk keperluan itu, lahir dari adat kebiasaan dan di luar naluri manusia. Memang, lanjut Ibnu Khaldun, kebiasaan dapat membawa manusia jauh dari hakikat kemanusiaannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu. Dalam Islam setiap orang yang hidup dimuka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya.

b. Kewajiban Masyarakat

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintahkan anggota keluarga untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada, saling menjamin mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. al-Quran menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, namun dalam beberapa hal Kitab Suci ini menekankan hak dan kewajiban, baik melalui kewajiban zakat, maupun melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau yang tidak, namun membutuhkan bantuan yang ditetapkan dalam surat at-Tubah ayat 60 :

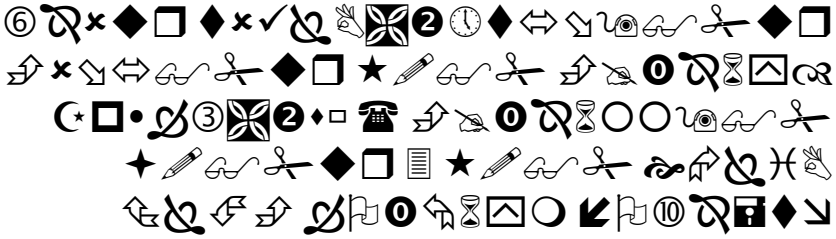

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[47]

Hak dan kewajiban tersebut mempunyai kekuatan tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan "paksaan" kepada yang berkewajiban untuk melaksanakannya. Bukan hanya paksaan dan lubuk hatinya, tetapi juga atas dasar bahwa pemerintahdapat tampil memaksakan pelaksanaan kewajiban tersebut untuk diserahkan kepada pemilik haknya.[48]

c. Kewajiban Pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumbersumber tersebut di atas belum mencukupi.

---

[47]Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah*…, h. 335

[48]Bayu Tri cahya, "*Kemiskinan Ditinjau Dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis*", STAIN Kudus, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Febuari 2015

Dalam Islam, Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa memang apa yang namanya kemiskinan tidak dapat dihapuskan begitu saja. Dalam paradigma Islam Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin sebegaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut :

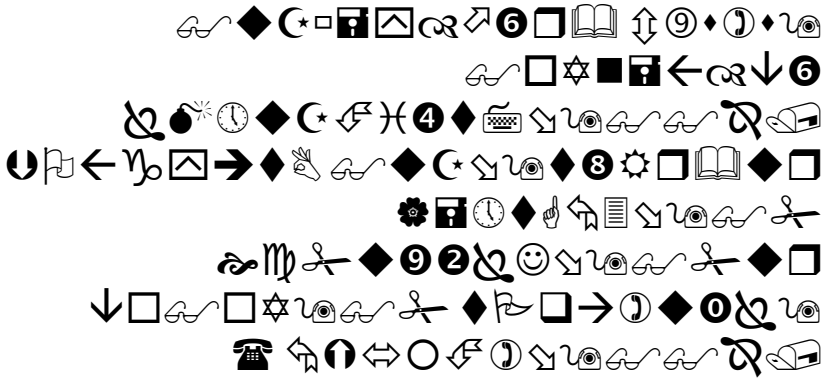

Artinya : *"Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".*[49]

[49]Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah*…, h. 235

BAB III
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Sukaraja adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan posisi geografisnya, luas wilayah Kecamatan Sukaraja mencapai lebih kurang 18,945.78 hektar. Ibu kota Kecamatan Sukaraja terletak di Kelurahan Sukaraja akan tetapi kantor camat Sukaraja terletak di desa Bukit Peninjauan II. Kecamatan Sukaraja memiliki 21 desa yang terdiri dari 2 kelurahan dan 19 desa definitif. Berikut ini adalah batas-batas wilayah Kecamatan Sukaraja :

a. Sebelah utara : Kabupaten Bengkulu Tengah
b. Sebelah selatan : Kecamatan Air Periukan
c. Sebelah timur : Kecamatan Lubuk Sandi
d. Sebelah barat : Kota Bengkulu dan Samudera Hindia[50]

Kecamatan Sukaraja keadaan topografinya sebagian besar datar, namun berbukit pada bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 2-50 mdpl. Secara geografis, satu Desa terletak di daerah pantai yaitu Desa Riak Siabun sedangkan 19 desa dan satu kelurahan lainnya terletak di daerah bukan pantai. Desa Riak Siabun Iadalah desa yang paling jauh dalam menjangkau kantor kecamatan, dengan jarak tempuh

[50] *Badan Pusat Statistik Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam angka 2018* http://selumakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/c972d07734ac5b63cf64801d/kecamatan-sukaraja-dalam-angka-2018.html pada hari selasa, tanggal 25 November 2019 WIB

sekitar 40 km. Luas wilayah terluas berada di Desa Padang Pelawi dengan luas 3 001,89 Km^2 atau sekitar 15,84 persen dari luas kecamatan.

Kecamatan Sukaraja terdiri dari 21 desa, yaitu:

- Kelurahan Sukaraja
- Desa Lubuk Sahung
- Desa Bukit Peninjauan II
- Desa Padang Pelawi
- Desa Kayu Arang
- Desa Niur
- Desa Cahaya Negeri
- Desa Bukit Peninjauan I
- Desa Riak Siabun
- Desa Jenggalu
- Kelurahan Babatan
- Desa Sido Sari
- Desa Sari Mulyo
- Desa Sido Luhur
- Desa Sumber Arum
- Desa Riak Siabun I
- Desa Padang Kuas
- Desa Kuti Agung
- Desa Air Kemuning
- Desa Air Petai

- Desa Sumber Makmur

Kecamatan Sukaraja terdiri dari 21 desa/ kelurahan definitif, yang terbagi menjadi dua kelurahan dan 19 desa. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang Surat Keputusan Penempatannya di keluarkan oleh Bupati. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa meliputi Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa. Setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa yang proses penunjukkannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Perangkat desa erdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Dusun (Kadus).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang dibentuk dari dan oleh masyarakat desa melalui pemilihan.[51]

2. Kependudukan

Tabel 3.1 Kependudukan

	ıian	ılah
	ki-laki	488
	empuan	170
	ılah	568

Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015

[51]*Badan Pusat Statistik Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam angka 2018* http://selumakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/c972d07734ac5b63cf64801d/kecamatan-sukaraja-dalam-angka-2018.html pada hari selasa, tanggal 25 November 2019 WIB

3. Sosial

a. Pendidikan

Tabel 3.2 Pendidikan

	ıian	ılah
	P	
	S	
	A	
	K	
	ı	
	ılah	

Sumber Data : Pendidikan Kabupaten Seluma[52]

b. Kesehatan

Tabel 3.3 Kesehatan

	ıian	ılah
	mah Sakit	
	kesmas	
	kesmas Pembantu	
	otek	
	yandu	

[52]*Badan Pusat Statistik Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam angka 2018* http://selumakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/c972d07734ac5b63cf64801d/kecamatan-sukaraja-dalam-angka-2018.html pada hari selasa, tanggal 25 November 2019 WIB

	nlah	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma[53]

c. Agama

Tabel 3.4 Agama

	ıian	nlah
	sjid	
	sholla	
	reja	
	a	
	ıara	
	nlah	6

Sumber Data : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Seluma

4. Pertanian

a. Tanaman Pangan

Tabel 3.5 Tanaman Pangan

	is Pengairan	ıs Lahan Sawah
	;asi	0
	n Irigasi	21
	nlah	81

Sumber Data : Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan, Penggunaan Lahan.

[53]*Badan Pusat Statistik, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam angka 2018* http://selumakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/c972d07734ac5b63cf64801d/kecamatan-sukaraja-dalam-angka-2018.html pada hari selasa, tanggal 25 November 2019 WIB

b. Perkebunan

Tabel 3.6 Perkebunan

	is Tanaman	ıs Tanaman
	pi	4
	ret	7
	apa	
	apa Sawit	-
	ngkeh	
	la	
	pi	
	yu Manis	
	miri	
	n	
	puk	
	ang	
	nlah	74

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Seluma.[54]

Dari penjelasan diatas tentang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 3 desa yaitu :

1. Penelitian Wilayah Desa Bukit Peninjauan 1

[54]Badan Pusat Statistik, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam angka 2018 http://selumakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/c972d07734ac5b63cf64801d/kecamatan-sukaraja-dalam-angka-2018.html pada hari selasa, tanggal 25 November 2019 WIB

a. Letak Geografis

Desa Bukit Peninjauan 1 mempunyai luas wilayah 75,1 ha/m2, 70% merupakan dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan karet dan sawit, persawahan, dan 30% merupakan perumahan masyarakat. Adapun batas-batas wilayah Desa Bukit Peninjauan 1 yaitu:

1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Arum.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sari Mulya.
3) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sido Luhur.
4) Sebelah Selatan berbatasan Desa Sumber Makmur.[55]

b. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data keterangan dari Sekretaris Desa Ibu Yulinda Sari, Rabu 20 Maret 2019 Desa Bukit Peninjauan 1 terbagi menjadi 7 Dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun (kadus). Untuk kelancaran dalam memimpin dan memberi pelayanan kepada masyarakat desa. Ketujuh dusun tersebut Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, Dusun 5, Dusun 6, Dusun 7.[56] Jumlah penduduk Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tahun 2019 1.818 jiwa.

Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

[55]Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h.7.

[56]Yulinda Sari, Sekdes Bukit Peninjauan 1, *Wawancara*, Tanggal 20 Maret 2019.

Tabel. 3.7 Data Penduduk Desa[57]

No	Penduduk	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	940
2	Perempuan	874
Jumlah		1.818

Sumber Data : Buku Induk Penduduk WNI Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015.

Dari data diatas jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, serta jumlah penduduk paling banyak terdapat pada dusun 6 yaitu 88kk dengan jumlah penduduk sebanyak 293 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut, masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 mampu menjaga kehidupan sosial dan hidup berdampingan tanpa ada keributan atau perselisihan antar sesamanya.

c. Kondisi Keagamaan Penduduk

Kehidupan beragama penduduk Desa Bukit Peninjauan 1 berjalan dengan baik dan harmonis, tanpa ada kesenjangan sosial meskipun adanya perbedaan agama. Sebagian besar penduduk Desa Bukit Peninjauan 1 yakin akan keberadaan Allah SWT, maka penduduk percaya bahwa agama Islam mampu mengatur hubungan

[57]Sumber: Data Buku Induk Penduduk WNI Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015.

baik antar sesamanya. Walaupun terdapat penduduk yang beragama selain Islam, namun semuanya berjalan dengan damai dan baik-baik saja tanpa ada konflik antara pemeluk agama lainnya. Berikut untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Agama

No	Jenis Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	1.788
2	Kristen	30
3	Hindu	-
4	Budha	-
Jumlah		1.818

Sumber Data : Buku Induk Penduduk WNI Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

Sarana dan prasarana peribadahan yang ada di Desa Bukit Peninjauan 1 telah cukup memenuhi kebutuhan masyarakatnya. seluruh penduduk Desa Bukit Peninjauan 1 beragama dan tidak seorang pun yang tidak menganut kepercayaan. Berikut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Jumlah Rumah[58]

No	Rumah Ibadah	Jumlah

[58]Sumber: Data Buku Induk Penduduk WNI Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015.

1	Masjid	3
2	Mushola	5
3	Gereja	1

Sumber Data : Buku Induk Penduduk WNI Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

d. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan salah satu prasarana untuk menuju masyarakat yang maju dan beradap. Masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 telah memiliki gedung pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Pondok Pesantren. Namun masyarakat Desa ini memilki tingkat pendidikan yang kurang baik, karena masyarakat Desa mayoritas tamatan SD Sederajat, SMP, SMA dan ada sebagian yang telah menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Tingkat Pendidikan[59]

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tidak Sekolah	342
2	Belum Tamat SD	200
3	SD	621

[59]Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015, h.18.

4	SLTP	407
5	SLTA	219
6	Diploma/Strata I	27
7	Strata II	2
	Jumlah	1.818

Sumber Data : Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, RPJMDES Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

Berikut ini fasilitas pendidikan di Desa Bukit Peninjauan 1, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Sarana Pendidikan[60]

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SMA	-
2	SMP	1
3	SD	2
4	TK	1
5	PAUD	-
6	Pesantren	1

Sumber Data : Buku Induk Penduduk WNI Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015

[60]Data Buku Induk Penduduk WNI Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015.

e. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Desa Bukit Peninjauan 1 memilki kategori kurang mampu, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor yang berbeda-beda. Sebagian besar di sektor petani/pekebun, karyawan swasta, dan wiraswasta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Mata Pencaharian

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan Swasta	150
2	Petani/Pekebun	452
3	Perdagangan	18
4	Karyawan BUMN	6
5	Peternak	2
6	Buruh Tani/Perkebunan	32
7	Buruh Harian Lepas	10
8	Sopir	2
9	Wiraswasta	146
10	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	28

11	Konstruksi	1
12	Tenaga Medis	2
13	Mekanik	3
Jumlah		852

Sumber Data : Buku Induk Penduduk WNI Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015[61]

Dari tabel diatas, terlihat sebagian besar masyarakat desa memilki mata pencaharian petani/pekebun dan wiraswasta. Dan ada beberapa masyarakat yang merangkap yaitu petani dan peternak untuk menambah pendapatan dan meningkatkan perekonomian mereka. Kemudian sebagaian buruh tani, mengelola lahan perkebunan orang lain dengan sistem bagi hasil dan sistem upah, dan sebagian pedagang dan karyawan swasta.

2. Diskripsi Wilayah Desa Sari Mulyo

a. Letak Geografis Desa Sari Mulyo

Desa Sari Mulyo pada awalnya adalah Desa Bukit Peninjauan II yang sebelumnya dimekarkan dan tergabung dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan Karena terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2004 Kabupaten Bengkulu selatan dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, maka beberapa Kecamatan pun dimekarkan juga. Dan untuk kecamatan sukaraja di mekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sandi, Kecamatan Air Priukan

[61]Data Buku Induk Penduduk WNI Desa Bukit Peninjauan 1 Tahun 2015.

dan Kecamatan Sukaraja. Desa Bukit Peninjauan II dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu Desa Bukit Peninjauan II, Desa Sari Mulyo dan Desa Sido Sari.

Pelaksanaan penelitian bertempatan di Desa Sari Mulyo Kec. Sukaraja Kab. Seluma di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 725 Ha yang terletak di wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dengan topografi darat.

Adapun batas-batas wilayah Desa Sari Mulyo berbatasan wilayah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sido Sari, Desa Bukit Peninjauan I dan Sumber Makmur.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tawang Rejo dan Air Priukan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talang Benuang.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Peni njauan II, Desa Kayu Arang dan Desa Padang Pelawi.

Luas wilayah Desa Sari Mulyo adalah 725 Ha yang terdiri dari 35% lahan Daratan, 50% lahan gambut dan 15% lahan rawa. Desa Sari Mulyo dibagi menjadi 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Mekar Sari, Dusun Mekar Bhakti, Dusun Mekar Jaya dan Dusun Mekar Indah. Dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan. Sementaranpusat Desa berada di Dusun Mekar Sari,

yang disetiap Dusun dipimpin Oleh Kepala Dusun (Kadus) dan disetiap dusun terbagi menjadi beberapa RT.

b. Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk desa Sari Mulyo berjumlah 2.091 jiwa, yang terbagi dalam empat wilayah.

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk

o	Desa	Jiwa	KK
1	Mekar Sari	650	143
2	Mekar Bakti	793	245
3	Mekar Jaya	465	145
4	Mekar Indah	183	72

Sumber Data : Desa Sari mulyo 2016-2018

Dari data diatas penduduk terbanyak ada di Dusun Mekar Bakti dengan jumlah 793 Jiwa dan 245 KK. Sedangkan penduduk terendah ada di Dusun Mekar Indah dengan jumlah 183 jiwa dan 72 KK.

Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat Desa Sari Mulyo yaitu, Buruh, PNS, Pedagang,Usaha Kecil, Petani dan Pertenak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 pekerjaan tahun 2018

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh	205 orang
2	PNS	10 orang

3	Pedagang	115 orang
4	Usaha Kecil	9 orang
5	Petani	375 orang
6	Peternak	15 orang
JUMLAH		729

Sumber Data : Desa Sari Mulyo, 2016-2018

Penggunaan tanah di Desa Sari Mulyo sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan karet dan sawit sedangkan sisanya tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sebagian besar pertanian di Desa Sari Mulyo Kec. Sukaraja merupakan sawah dengan 2 kali musim tanam padi, berikut ini klasifikasi penduduk menurut penddikan.

Tabel 3.15 pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	891
2	SMP atau sederajat	235
3	SMA atau sederajat	25
4	Sarjana	13
5	Pra sekolah	927
JUMLAH		2.091

Sumber Data : Desa Sari Mulyo, 2016-2018

c. Keadaan Sosial serta Sarana dan Prasaranan Desa

Tingkat pendidikan di Desa Sari Mulyo Kec. Sukaraja semakin lama semakin meningkat dengan adanya sarana prasaran dan lulusan yang kompeten. Kondisi sarana prasarana umum Desa Sari Mulyo secara garis Besar adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Saran dan Prasarana

NO	ARANA/PRASARANA	UMLAH	KET
1	ai Desa	1 unit	Baik
2	N	1 unit	Baik
3	olah PAUD/TK	2 unit	Baik
4	ingan Padi	2 unit	Baik
5	npat pemakaman Umum	1 unit	Baik
6	Q	2 tempat	Baik
7	nbatan Beton (penghubung)	10 unit	4 rusak

Sumber Data : Desa Sari Mulyo, 2016-2018

d. Sarana Ibadah

Ditinjau menurut agama penduduk di Desa Sari Mulyo adalah pemeluk agama yang heterogen. Penduduk desa Sari Mulyo memeluk agama islam dan kristen/kristiani (protestan, khatolik). Sebagian besar penduduk memeluk agama islam. Adapun jumlah pemeluk agama islam ± 87% orang dan penganut kristiani adalah ± 13%.

Tabel 3.17 Sarana Ibadah

NO	nis Sarana Ibadah	Jumlah	Ket

1	sjid	4 unit	-
2	sholah	3 unit	-
3	reja	1 unit	-
4	a	-	-
5	hara/kuil	-	-

Sumber Data : Desa Sari Mulyo, 2016-2018

Dari keterangan diatas, tempat ibadah merupakan tempat yang penting untuk mendukung dalambidang pendidikan agama dan meningkatkan keimanan bagi masyarakat Desa Sari Mulyo Kec. Sukaraja dengan adanya masjid dan gereja.

e. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sari mulyo secara kasat masa terlihat jelas perbedaannya anatara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor usaha yang berbeda-beda, sebagian besar disektor non formal sebagai petani, buruh, dagang dan disektor formal sebagai PNS pemda, guru honorer.

f. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi Desa Sari Mulyo Kec. Sukaraja menganut sistem kelembagaan pemerintah Desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sari mulyo Ke. Sukaraja

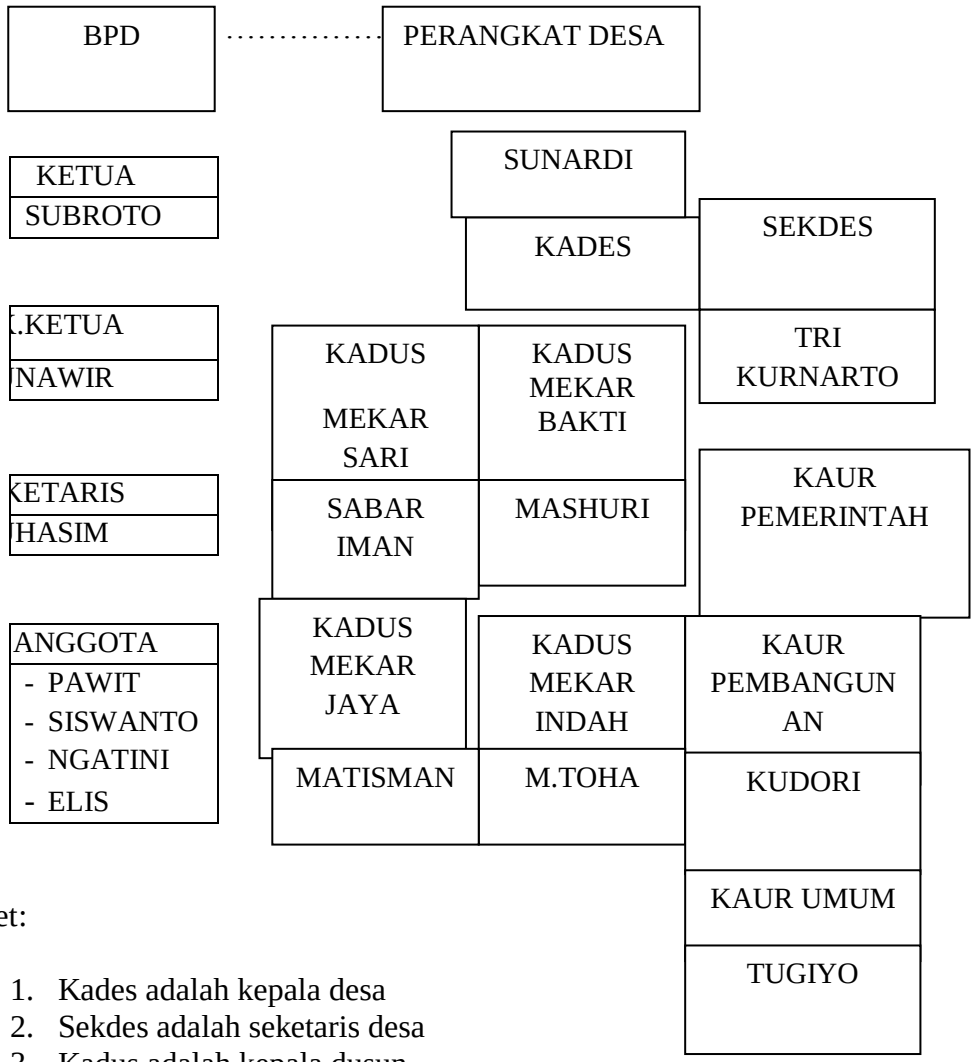

Ket:

1. Kades adalah kepala desa
2. Sekdes adalah seketaris desa
3. Kadus adalah kepala dusun
4. Kaur adalah kepala urusan
5. BPD adalah badan permusyawaratan desa.[62]

3. Diskripsi Wilayah Desa Sumber Arum

[62] Data Desa, Pemerintahan Kabupaten Seluma Kec. Sukaraja Desa Sari Mulyo, 2016-2018

a. Letak Geografis Desa Sumber Arum

Desa Sumber Arum terletak di dalam wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Desa Sumber Arum memiliki luas 319.1 ha. Batas wilayah Desa Sumber Arum adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatsan dengan Desa jenggaI Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidoluhur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Peremajaan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Luas wilayah Desa Sumber Arum adalah dimana 10,5 ha berupa daratan yang bertopografi dataran Rendah dan sedikit berbukti yang digunakan sebagai bedeng bata, sisanya di gunakan sebagai areal pemukiman, lahan kebun warga dan lahan pertanian.

Iklim Desa Sumber Arum, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pembuat bata yang dilakukan oleh warga.

b. Visi dan Misi Desa

1) Visi

Desa yang sehat, nyaman, berkualitas dan bisa membantu serta mengayomi masyarakat.

2) Misi

Meningkatkan ekonomi masyarakat, Mempermuda masyarakat dalam melakukan urusan kedesaan, Dapat membantu pendapatan daerah.

c. Keadaan Penduduk

Luas wilayah desa Sumber Arum adalah 9,1 hektar, dengan rincian daratan 80%, dan 20% lainnya.[63]

1) Tingkat kesejahteraan sosial

Tabel 3.18 Tingkat Kesejahteraan Sosial

	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah KK Miskin	70 kk
2.	Jumlah KK Sedang	55 kk
3.	Jumlah KK Kaya	11 kk
	Jumlah	136 kk

Sumber Data: Profil Desa Sumber Arum

[63]Alisandra, Kepala Desa Sumber Arum, Wawancara 05 Februari 2019

Grafik 3.1 Tingkat Kesejahteraan Sosial

Sumber Data: Profil Desa Sumber Arum

Dari tabel dan diagram di atas dapat dilihat bahwa di Desa Sumber Arum mempunyai 136 kk. Dengan kk miskin berjumlah 70 kk, kk sedang berujumlah 55 kk sedangkan kk kaya berjumlah 11 kk. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa dan masyarakat desa Sumber Arum, alasannya karena desa Sumber Arum merupakan salah satu desa yang menerima program keluarga harapan.

a. Tingkat pendidikan

Tabel 3.19 Tingkat Pendidikan

	Uraian	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	31 orang
2.	Tamat SD	215 orang
3.	Tamat SLTP	210 orang

4.	Tamat SLTA	50 orang
5.	Tamat Diploma/Sarjana	10 orang
	Jumlah	516 orang

Sumber Data: Profil Desa Sumber Arum

Grafik 3.2 Tingkat Pendidikan

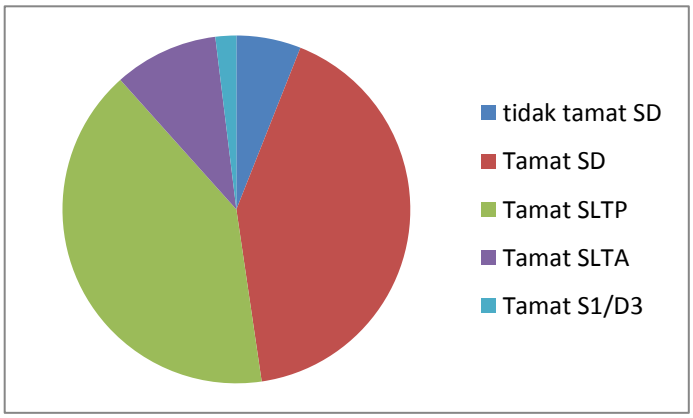

Sumber Data: Profil Desa Sumber Arum

Dari tabel dan diagram di atas bahwasanya masyarakat desa Sumber Arum tidak tamat SD berjumlah 31 orang, tamat SD berjumlah 215 orang, sedangkan tamat SLTP berjumlah 10 orang. Penelitian ini dilakukan pada perangkat desa dan masyarakat desa Sumber Arum, alasannya karena perangkat desa rata-rata tamatan SLTA dan Diploma/Sarjana.

b. Agama

Tabel 3.20 Agama

	Uraian	Jumlah
1.	Islam	516 orang

2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Konghucu	-
	Jumlah	516 Orang

Sumber Data: Profil Desa Sumber Arum.[64]

Grafik 3.3 Agama

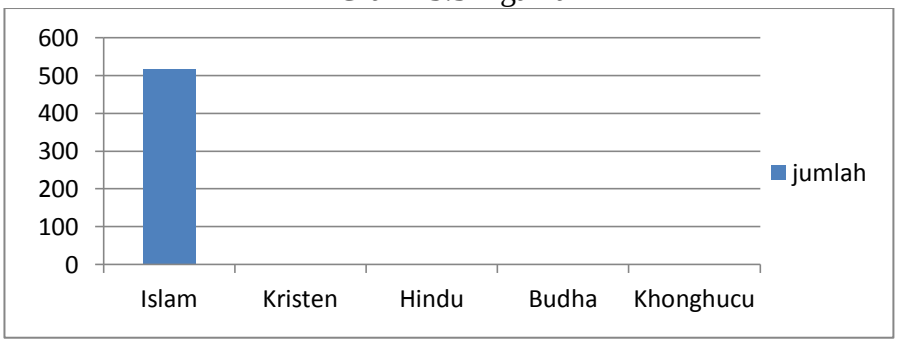

Sumber Data: Profil Desa Sumber Arum

Dari aspek keagamaan masyarakat desa Talang Besar semuanya 100 % beragam islam sehingga sebagai perangkat desa seharusnya mejalankan kepemimpina sesuai dengan syari'at islam.

[64]Profil Desa, Kantor Kepala Desa Sumber Arum, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sudah berjalan sejak tahun 2013 yang lalu, tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Adapun proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma memelalui beberapa proses yaitu :

1. Diawali dari pengiriman data warga miskin ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten, BPS membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Data tersebut akan diolah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, yang difasilitasi oleh

Bupati, Camat, Kepala Desa dan BPS memberikan data untuk disimpan Dinas Sosial dan PT. Bank Rakyat Indonesia.

3. Selanjutnya Dinas Sosial mengverikasi data yang akan menerima bantuan PKH ke PT. Bank Rakyat Indonesia, Dinsos memberikan data penerima PKH beserta kartu Kompensasi bantuan kepada Pendamping PKH tingkat Koordinator Kecamatan.

4. Koordinator kecamatan memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada pendamping desa PKH.

5. Pendamping memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada kepala Desa.

6. Kepala desa memberikan kartu kompensasi bantuan kepada warga yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan.

7. Pembukaan rekening penerima PKH oleh Bank Rakyat Indonesia.

8. Untuk pengambilan dana dilakukan di Bank Rakyat Inddonesia dengan Rekening atau ATM masing-masing penerima Bantuan Program Keluarga Harapan dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan atau biaya apapun. Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang pelaksaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten seluma yang terdiri dari beberapa informan :

a. Koordinator PKH

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi Hermanto bahwa pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan sesuai dengan data yang ada dengan peserta PKH kurang lebih 2100 dari tahun 2015. Kalau masalah tujuan kita ngikuti ketetapan pusat dengan ada jangka

pendek dan ada jangka panjangnya kalo jangka pendeknya disegi kesehatannya PKH itu harus hidup sehat hidup bersih dan jangka panjang rata-rata mereka ini mendapatkan KIS jadi kalo mau berobat sudah tidak bayar lagi gratis. Sasaran PKH adalah keluarga yang berdasarkan kategori miskin karena PKH ini bantuan yang bersyarat balita, pendidikan, lansia dan penyandang disabilitas.[65]

Program Kelurga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Tujuan dari PKH ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup kelurga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

b. Pendamping PKH

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eva sosialisasi sudah dilaksanakan dari awal datangnya PKH, pertama dari Dinsos dulu ya sudahnya turun ke pendamping terus itu langsung terjun kemasyarakatnya setelah data sudah diterima. Tugas yang dilakukan yang pertama yaitu tadi sosialisasi, memvalidasi, pertemuan kelompok, memutakhiran data yang dilakukan 3 bulan sekali. Penyaluran dilakukan 3 bulan sekali yang berbeda hanya tanggal yang belum pasti. Dari program yang diadakan adalah senam setiap hari minggu, kerja bakti setiap hari jumat untuk lansia dan kewajiban

[65]Edi Hermanto, *Koordinator PKH*, wawancara pada tanggal 13 Oktober 2019

peserta PKH memeriksakan kesehatan untuk anak balita dan mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial bagi lansia.[66]

Pendamping PKH bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

c. Peserta PKH

Berdasarkan wawancara dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan Ibu Suparmi Desa Bukit Peninjauan I mulai mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan Dari Tahun 2015 dengan mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun sampai sekarang. Akan tetapi ibu suparmi tidak sering mengikuti kegiatan sosialisasi karena tidak ada kegiatan PKH, dan kewajiban peserta PKH ibu Suparmi melaksanakannya. Manfaat dan perubahan yang dirasakan sangat membantu mencukupi keperluan anak sekolah dan balita.[67]

"..Menurut Ibu Syarifah Desa Bukit Peninjuan I dari tahun 2015 mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp.2.500.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun, iya ibu syarifah

[66]Eva, *Pendamping Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 14 Oktober 2019

[67]Suparmi, *Peserta Program Keluarga Harapan*, wawancara pada tanggal 18 Oktober 2019

pernah mengikuti sosialisasi terkait PKH. Bantuan PKH yang di dapat hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok dan belum bisa dikatakan untuk pengentasan kemiskinan.

Ibu Juariah Desa Bukit Peninjauan 1 dari tahun 2015 mendapatkan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dalam pertemuan kelompok yang dibahas tentang pengeluaran dana PKH dan penggunaan dana dari bantuan PKH tersebut. program pkh untuk lansia adalah setiap minggunya diadakan senam jantung, kerja bakti di balai desa dan mengikuti pertemuan kelompok akan tetapi ibu juariah tidak mengikuti kewajibannya.[68]

Ibu Ningsih Desa Bukit Peninjauan I mendapatkan bantuan dari tahun 2015 mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dengan jumlah 2.500.000 setiap 3 bulan sekali dalam setahun dan tidak pernah mengikuti kegiatan dalam bidang kesejahteraan sosial dikarnakan faktor sudah tua, tidak sanggup mengikuti banyaknya kegiatan.[69]

Ibu Yuyum Desa Bukit Peninjauan I mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp.2.500.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun, senang sekali mendapatkan bantuan pkh

[68]Juariah, *Peserta Program Keluarga Harapan*, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2019
[69]Ningsih, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2019

karena membantu untuk memenuhi kebutuahan balita dan megikuti kegiatan program posyandu setiap bulannya.[70]

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratih Desa Sari Mulyo sebagai berikut:

PKH dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan meskipun tidak secara cepat, namun setidaknya ada sebuah usaha untuk mengurangi kemiskinan. Peserta PKH tetap berusaha bekerja meskipun sudah mendapat bantuan, karena untuk menunjang proses pengentasan kemiskinan mungkin sangat sulit dilakukan karena bantuan PKH hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok.[71]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu prayet yang mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan pkh sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi.[72]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sinah desa Sari Mulyo Tidak masalah bagi saya untuk melakukan kewajiban sebagai peserta PKH mengikuti kegiatan di posyandu, tapi kegiatan di posyandu itu membosankan dan sangat menyita waktu. Bagaimana tidak, jika seharusnya saya bisa melakukan pekerjaan lain namun saya harus menunggu lama di pos dan anak saya terkadang rewel.

Saya harus meninggalkan pekerjaan di rumah dan membawa anak saya ke posyandu. Sesampainya di posyandu, saya

---

[70]Yuyum, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2019
[71]Ratih, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 23 Oktober 2019
[72]RanI, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 24 Oktober 2019

masih harus fokus menunggu lama dalam antrian. Jadi terkadang saya tinggal begitu saja setelah saya menimbangkan anak saya. Karena ya gimana, anak saya rewel terus.[73]

Ibu Lusi mendapatkan bantuan komponen dari tahun 2015 komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp. 2.500.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun. Kewajiban PKH untuk memeriksakan kesehatan ke posyandu tetapi jarang saya hadir dikarnakan anak saya sudah umur 4 tahun hanya menimbang berat badan saja jarang saya hadir.[74]

Ibu Baidin mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa pkh dapat membantu kebutuhan pokok di mana saya tidak dapat bekerja dikarnakan faktor usia dan tidak bisa mengikuti kegiatan atau program dari PKH. Bantuan pkh hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok dan belum bisa dikatakan sebagai pengentasan kemiskinan.[75]

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erna Desa Sumbr Arum mendapatkan PKH dari tahun 2015 Pada saat pertemuan rutin hampir sebagian dari peserta tidak mengerti apa kewajiban penerima pkh dan tujuan PKH, Jauh lebih lanjut PKH pada dasarnya bertujuan untuk pengentasan kemiskinan yang berupa bantuan tunai bersyarat tetapi belum dapat dikatakan sebagai

[73]Sinah, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2019
[74]Lusi, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2019
[75]Baidin, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2019

pengentasan kemiskinan karena bantuan PKH hanya dapat digunakan sebagai kebutuhan pokok saja, tetapi tidak semua penerima manfaat mengalokasikan bantuan PKH belum sesuai dengan aturan dan ketetapan PKH".[76]

Ibu Leni mendapatkan bantuan kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dari tahun 2015 dengan jumlah bantuan Rp.2.500.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan setiap tahunnya. Dengan adanya bantuan PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dan bisa dikatakan sebagai pengentasan kemiskinan. Kewajiban PKH memeriksakan kesehatan ke posyandu setiap bulannya saya selalu hadir.[77]

Ibu Suliem Desa Sumber Arum memdapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. dimana dengan faktor usia ibu Suliem sehingga tidak bisa bekerja lagi dengan adanya PKH dapat membantu perekonomiannya walaupun hanya 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun.[78]

Ibu yanti Desa Sumber Arum mendapatkan banatuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan pkh sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi.[79]

---

[76]Erna, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 30 Oktober 2019
[77]Nyaik, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 30 Oktober 2019
[78]Suliem, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 30 Oktober 2019
[79]Yanti, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 30 Oktober 2019

Ibu Supreh mendapatkan bnatuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp.2.500.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun. Kewajiban peserta PKH memeriksakan Kesehatan anak tetapi saya jarang hadir dalam posyandu.[80]

Dari hasil wawancara di tiga Desa dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum terlaksana dengan baik, karena sebagian peserta PKH tidak memeriksa kesehatan untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan tidak mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial seperti senam dan kerja bakti untuk usia 60 (enam puluh) tahun ke atas setiap bulannya.

Seharusnya pihak pendamping melihat faktor usia dari peserta PKH dan membuat program yang lebih relevan untuk komponen kesejahteraan sosial terutama untuk lansia dan untuk komponen kesehatan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun peserta PKH mempunyai kesadaran untuk memeriksakan anaknya ke posyandu dan pendamping PKH untuk lebih membuat kegiatan penyuluhan tentang manfaat kesehatan, meskipun peserta PKH tidak aktif tetapi bantuan rutin tetap diterima.

B. Pembahasan

[80]Supreh, *Peserta Program Keluarga Harapan*, Wawancara pada tanggal 30 Oktober 2019

1. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentasankan Kemiskinan Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Dalam hal mengentaskan kemiskinan Islam memandang bahwa kemiskinan tidak dapat dihilangkan namun masih ada upaya untuk meminimalisir kemiskinan agar kehidupan sejahtera dapat diraih. Menurut Teori Quraisy Shihab[81] secara garis besar usaha terhadap pengentasan kemiskinan dalam Islam dapat dibagi tiga hal yaitu :

a. Kewajiban setiap individu

Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci al-Quran, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Kalau demikian kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. Sedang mengharapkan usaha orang lain untuk keperluan itu, lahir dari adat kebiasaan dan di luar naluri manusia. Memang, lanjut Ibnu Khaldun, kebiasaan dapat membawa manusia jauh dari hakikat kemanusiaannya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jalan pertama dan utama yang diajarkan al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu. Dalam Islam setiap orang yang hidup dimuka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta

[81]Kartiawati, Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)..., hal 38-39

keluarganya. Ini berkaitan dengan adanya program bantuan PKH, dimana meskipun keluarga yang kurang mampu mendapat bantuan PKH namun mereka tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena bantuan PKH ini hanya bersifat membantu untuk meringankan kebutuhan kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial untuk lansia dan bukan untuk memenuhi secara keseluruhan kebutuhan kehidupan keluarga yang kurang mampu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari teori kewajiban individu sudah memenuhi usaha tarhadap pengentasan kemiskinan dalam Islam.

b. Kewajiban masyarakat

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintahkan anggota keluarga untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada, saling menjamin dan mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. al-Quran menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, namun dalam beberapa hal Kitab Suci ini menekankan hak dan kewajiban.

Adapun peraturan kewajiban peserta PKH mengikuti kegiatan senam dan kerja bakti untuk lansia dan memeriksakan kesehatannya ke posyandu untuk anak balita umur 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun setiap bulannya. Dari pihak pendamping tidak melihat faktor usia dari peserta Program Keluarga Harapan dan membuat program yang lebih relevan untuk komponen kesejahteraan sosial terutama untuk lansia dan

dari pihak peserta Program Keluarga Harapan banyak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memeriksakan kesehatan setiap bulannya, seharusnya peserta Program Keluarga Harapan mengikuti kewajibannya sebagai peserta Program Keluarga Harapan, meskipun peserta PKH tidak aktif tetapi bantuan rutin tetap diterima.

Dari teori kewajiban masyarakat Islam memerintahkan anggota keluarga untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada, tetapi peserta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peserta PKH jadi usaha pengentasan kemiskinan dalam Islam belum terlaksana. Seharusnya peserta PKH harus memenuhi Hak dan Kewajibannya sebagai peserta PKH agar usaha pengentasa kemiskinan dapat terlaksana.

c. Kewajiban Pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumbersumber tersebut di atas belum mencukupi.[82]

Dalam Islam, Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa memang apa yang namanya kemiskinan tidak dapat dihapuskan

[82]Bayu Tri cahya, "*Kemiskinan Ditinjau Dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis*", STAIN Kudus, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Febuari 2015, h 6-9

begitu saja dalam paradigma Islam, adanya bantuan Program Keluarga Harapan adalah sebatas untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di masyarakat.[83] Bantuan dari program keluarga harapan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga bantuan tersebut tidak bisa dijadikan untuk membuka usaha yang dapat mengentasi kemiskinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori kewajiban pemerintah belum terlaksana dengan usaha pengentasan kemiskinan dalam Islam.

Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan bantuan dana PKH sehingga dana PKH tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha agar peserta PKH tersebut mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori kewajiban pemerintah belum terlaksana dengan usaha pengentasan kemiskinan dalam Islam.

[83]Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)...*, hal 38-39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sukaraja belum terlaksana dengan baik, karena pihak Pendamping PKH tidak membuat program yang sesuai dengan komponen kesejahteraan sosial, seharusnya pihak pendamping melihat faktor usia dari peserta PKH dan membuat program yang lebih relevan untuk komponen kesejahteraan sosial terutama untuk lansia dan balita, sebagai peserta PKH pada umumnya tidak memeriksa kesehatan dan tidak mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan seperti senam dan kerja bakti setiap bulannya, meskipun peserta PKH tidak aktif tetapi bantuan rutin tetap diterima lansia Rp.2.500.000 dan balita Rp.2.500.000.
2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena peserta PKH ada yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai peserta PKH. Sedangkan Islam berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan walaupun uang bantuan rutin yang diterima dari program PKH hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehingga bantuan tersebut tidak bisa dijadikan untuk membuka usaha yang dapat mengentaskan kemiskinan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan memberikan motivasi kepada peserta PKH sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak yang baik bagi generasi selanjutnya. Koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak terkait juga menjadi faktor yang terwujudnya tujuan dari implementasi program PKH.
2. Bagi koordinator PKH Program keluarga harapan perlu di evaluasi dan monitoring lebih baik lagi, melakukan sosialisasi baik secara nasional untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang benar mengenai Program Keluarga Harapan.
3. Diharapkan kepada pendamping PKH agar melaksanakan tugas dengan baik dan membuat program yang relevan terutama untuk lansia. serta meningkatkan peran aktifnya dalam proses berjalannya program diskusi maupun pertemuan lain yang sifatnya mendukung.
4. Bagi peserta PKH melaksanakan kewajibannya dengan baik, mengikuti kewajibannya sebagai peserta PKH dan mengikuti Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Asnaini,dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Febi. 2016.

Badan Pusat Statistik Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam angka 2018 http://selumakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/c972d07734ac5b63cf64801d/kecamatan-sukaraja-dalam-angka-2018.html pada hari selasa, tanggal 25 November 2019 WIB.

Ghony, M. Djunedi dan Fauzan Almanshur. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruaz Media. 2012

Hurairah, *Setrategi Penanggulangan Kemiskinan.* Bandung: Nala Cipta litera. 2012.

Idri. *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi.* Jakarta: Prenada Media Group. 2015.

Khomsan dkk, Ali, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015

Lestari Rahayu, Sri. *Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Kedepan*. Bandung: Fokus Media. 2012.

Masuta Laluhang,Sri. *Implementasi Program Kelurga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Ke. Kendahe, Kab. Sangihe*, dikutip dari http://www.file:///C:/Users/mulia/Dowloads/7597-14952-1-SM.pdf. pada hari kamis, tanggal 25 Oktober 2018, jam 13.24 WIB.

Matalata, Andi. *Materi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Jakarta: Kepala Biro Peratuaran Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. 2009.

Meleong, Lexy. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Murti, Krisna, et.al. *Analisis Diskriminan Untuk Menentukan Indikator Garis Kemiskinan atau Jurnal Gizi dan Pangan*. Bogor: IPB. 2008.

Moh, Nasir. *Metode Penelitian.* Bandung: Mizan. 2009.

Nabil, Subhi ath-Thawil. *Kemiskinan dan keterbelakangan di Negara-negara Muslim.* Bandung: Mizan. 2008.

Nashiruddin Al-AlbaniSyaikh Muhammad, Sa'id Bin 'aliWahf Al-Qahthani. *Hadits Arba'in*. Jakarta: Daarut Tarbiyah. 2008.

Nasir Moh. *Metode Penelitian.* Bandung: Mizan. 2009.

Pawito, *Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Pelangi Perkasa. 2007.

Pahmi, Iril. *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Karimun* diikutip dari http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/viewFile/159/432, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, pukul 14:21 WIB.

Pemensos Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Profil Kecamatan Sukaraja, Kantor Kecamatan Sukaraja, 2018.

Profil Desa Sumber Arum, Kantor Kepala Desa, 2018.

Profil Desa Bukit Peninjauan 1, Kantor Kepala Desa, 2018.

Profil Desa Sari Mulyo, Kantor Kepala Desa, 2018.

Rianto, M Nur. Teori Makroekonomi Islam. Bnadung: Alfabeta. 2010.

Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Di Indonesia.* Jakarta: Cv Alfabeta. 2013.

Suryawati, Crisdani. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.* Jakarta: Al-kausar. 2009.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sodikin, Ikan. *Kebijakan Pelayanan dan Kepentingan Publik*. Bandung: Ceples. 2012.

Sosial RI, Departemen. *Petunjuk Teknis Program Kelurga Harapan Kepala Rumah Tangga Sasaran*. Jakarta: Depsos RI. 2014.

Tri Cahya, Bayu. "*Kemiskinan Ditinjau Dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis*", STAIN Kudus, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Febuari 2015

Yusuf. *Konsep Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Surabaya: Bina Islam. 2015.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan pendamping PKH Ibu Eva

Dokumentasi wawancara dengan peserta PKH Ibu Syarifah

Dokumentasi wawancara dengen peserta PKH Ibu Juariyah

Dokumentasi wawancara dengen peserta PKH Ibu Suparmi

Dokumentasi wawancara dengen peserta PKH Mbah Prayet

Dokumentasi wawancara dengen peserta PKH Ibu Novi